



▶ PELAKSANA KONSTRUKSI

## Gapensi Sepakat TP4D Dibubarkan Saja

**JOGJA**—Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Jogja selama ini risih dengan keberadaan Tim Pengawal Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D). Organisasi ini pun sepakat TP4D dibubarkan.

*Sunartono*  
[sunartono@harianjogja.com](mailto:sunartono@harianjogja.com)

Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kota Jogja Periode 2015-2019, Suharsono, tidak mempersoalkan jika TP4D dibubarkan karena di era saat ini fungsi pengawasan sudah dilakukan banyak pihak, terutama masyarakat. Ia mengatakan para pelaksana konstruksi sudah menjalankan pekerjaan sesuai kredibilitas, sehingga tanpa ada TP4D pun siap melaksanakan pekerjaan sesuai standar dan berkualitas.

Menurutnya, selama ini sebagian anggota Gapensi mengaku risih dengan TP4D. "Kami agak risih karena selalu diawasi, apakah itu karena hasil akhir dari pekerjaan

▶ Pengusaha konstruksi diminta bersaing dengan cara yang benar dalam sebuah proyek.

▶ Gapensi risih karena selalu merasa diawasi oleh TP4D

[kami] dianggap kurang memuaskan sehingga dibentuk tim itu. Maka kalau sekarang mau dibubarkan ya silakan," katanya di sela-sela *Muscab IX BPC Gapensi Kota Jogja* di salah satu hotel di Jalan Timoho, Kota Jogja, Kamis (28/11).

Sebelumnya, KPK pada Agustus 2019 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa terkait suap TP4D di Kota Jogja.

Suharsono mengatakan tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek pemerintah harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai mementingkan ego kemudian menerabas aturan yang memperburuk citra rekanan itu sendiri. Apalagi saat ini semua pihak bisa mengawasi pelaksanaan proyek, mulai dari aparat hingga masyarakat.

"Siapa pun yang memimpin Gapensi, nanti harus memikirkan tanggung jawab atas kualitas pekerjaan, itulah

yang harus dijaga. Kami berharap semua bisa menjaga kredibilitas dan bertanggungjawab atas profesinya," katanya.

Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudyatmoko, meminta pengusaha konstruksi agar bersaing dengan cara yang benar dalam sebuah proyek. Karena itu, anggota Gapensi harus meningkatkan kapasitas terutama kualitas pelaksana jasa konstruksi. Apalagi saat ini proses lelang pengadaan jasa konstruksi sangat terbuka. Jika kapasitas dibangun dengan baik maka pengusaha jasa konstruksi tidak akan terpengaruh dengan berbagai iming-iming atau menggunakan cara di luar ketentuan.

"Saya kira enggak perlu [memberikan fee proyek], LPSE Kota Jogja itu paling susah ditembus dari manapun, karena sistemnya rapat, artinya apa? Ini hanya bisa ditembus dengan adanya tekanan karena sistem yang dibangun Pemkot Jogja untuk memproteksi LPSE ini sudah luar biasa," ucapnya.

Danang sepakat jika TP4D dibubarkan, karena tim ini sebenarnya tidak mengurus ke arah teknis. "Kenapa TP4D masuk ke ranah teknis, itu yang jadi pertanyaan," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Layanan Pengadaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005